

# KONSEP *INNAMAL A'MALU BINNIYAT* PADA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA PONDOK PESANTREN

(Studi Kasus Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet Pamekasan)

Marhomah<sup>1</sup>, Evi Malia<sup>2</sup>, Imam Agus Faisol<sup>3</sup>, Nailah Aka Kusuma<sup>4</sup>

Universitas Islam Madura

Pamekasan<sup>1</sup> Universitas Islam

Madura Pamekasan<sup>2</sup> Universitas

Trunojoyo Madura Bangkalan<sup>3</sup>

Universitas Islam Madura

Pamekasan<sup>4</sup>

Email: [evimalia@uim.ac.id](mailto:evimalia@uim.ac.id), [imam.akuntansi@gmail.com](mailto:imam.akuntansi@gmail.com) ,  
[nailahakakusuma@gmail.com](mailto:nailahakakusuma@gmail.com)

## Abstract

*The purpose of this study was to determine the concept of innamal a'malu binniyat in the accountability report for the Miftahul Ulum Bettet Pamekasan Islamic Boarding School. The type of method used in this research is qualitative with a descriptive approach. the method used in data collection using interview techniques, observation and documentation carried out to informants. The informants of this research include the general treasurer, the executive committee, and the deputy head of the Miftahul Ulum Bettet Pamekasan Islamic Boarding School. The results of this study indicate that the concept of innamal a'malu binniyat implemented by the Islamic Boarding School has not been balanced with accountability and transparency. So that the impact of the absence of separation of organizational duties, accountability, clear transparency can result in the concept of innamal a'malu binniyat which is not ideal.*

**Keywords:** *Concept of Innamal A'malu Binniyat, Accountability Report, Islamic Boarding School Fund*

## Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep *innamal a'malu binniyat* pada laporan pertanggung jawaban dana Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet Pamekasan. Jenis metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. metode

yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan kepada informan. Informan penelitian ini meliputi bendahara umum, panitia pelaksana, dan wakil pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet Pamekasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *innamal a'malu binniyat* yang dijalankan Pondok Pesantren belum diimbangi dengan akuntabilitas dan transparansi. Sehingga dampak dari tidak adanya pemisahan tugas organisasi, akuntabilitas, transparansi yang jelas dapat berakibat pada konsep *innamal a'malu binniyat* yang tidak ideal.

**Kata Kunci:** Konsep *Innamal A'malu Binniyat*, Laporan Pertanggung Jawaban, Dana Pondok Pesantren

## PENDAHULUAN

Sejalan perkembangan zaman maka diikuti pula perkembangan dari segala lini organisasi, tidak terkecuali perkembangan organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba merupakan organisasi yang bergerak dalam pelayanan sosial yang tidak bertujuan mencari keuntungan atau laba. Organisasi nirlaba dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu organisasi nirlaba pemerintahan dan organisasi nirlaba non pemerintahan. Salah satu organisasi nirlaba non pemerintah yaitu Pondok Pesantren yang berada dibawah naungan yayasan.

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2001 bahwasanya Yayasan merupakan badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Sebagai entitas nirlaba, yayasan memperoleh dana berupa sumbangan dari donatur, masyarakat, dan pemerintah untuk melangsungkan kegiatan operasionalnya. Walaupun para pemberi dana tidak mengharapkan pengembalian atas dana yang telah diberikan, pihak yayasan harus mampu membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas transaksi dana, laporan keuangan tersebut sekaligus berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan oleh berbagai pihak. (Atufah et al, 2018). Dari pernyataan tersebut menggambarkan begitu pentingnya suatu laporan pertanggungjawaban bagi Pondok Pesantren karena dalam pesantren juga membutuhkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana mestinya. Pesantren merupakan salah satu elemen bangsa

Indonesia dan sudah mematenkan diri secara integratif menjadi bagian dari budaya bangsa yang bercirikan religius.

Tujuan pendidikan Pesantren adalah menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat, atau berkhidmat kepada masyarakat dengan jalan menjadi kawula atau abdi masyarakat, yaitu menjadi pelayan masyarakat sebagaimana kepribadian Nabi Muhammad (mengikuti Sunah Nabi), mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh dalam kepribadian, menyebarkan agama atau menegakkan Islam dan kejayaan umat di tengah-tengah masyarakat dan mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian manusia ( Budifa: 2018).

Teramat jelas bahwasanya Pesantren lebih mengutamakan suatu tingkat nilai religiutas begitupula dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban dana pesantren yang memang lebih mengutamakan kepercayaan sehingga dalam pembuatannya tidak mengikuti aturan pemerintah berupa pedoman Akuntansi Pemerintah. Dalam hal ini juga dikuatkan dalam hadits yang memang menjadi pamungkas dalam pesantren yaitu hadits Imam al-bukhori yaitu imam yang pertama kali menyusun kitab hadits yang secara khusus menghimpun hadits-hadits yang berkualitas sahih. Dalam haditsnya di awal kitab beliau menyebutkan hadits :

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ أَمْرٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوَّجُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Dari Umar radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai ke mana ia hijrah.” (HR. Bukhari, Muslim, dan empat imam Ahli Hadits) sesuai dengan makna yang tersirat dalam hadits tersebut bahwasanya segala perbuatan tergantung niatnya dan segala

perbuatan jika tidak diniatkan karena mengharapkan ridha Allah maka pekerjaan tersebut akan terbuang sia-sia. Sama halnya dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban dana pesantren tetap memegang teguh akan suatu keyakinan dari setiap entitas, karena pesantren tetap mengedepankan nilai religius yang memang ditanamkan dalam pesantren.

Laporan pertanggung jawaban sangatlah dibutuhkan dalam perkembangan tata kelola suatu organisasi menuju suatu organisasi *good governance* maka akan menjadi suatu keharusan bagi lembaga menerapkan laporan pertanggungjawaban sesuai PSAK-45. Melihat perkembangan Pondok Pesantren yang semakin baik dari segi kehidupan global begitu juga dari faktor ekonomi sehingga membutuhkan suatu laporan pertanggungjawaban keuangan maka dari itu munculah sebuah regulasi untuk pesantren terkait akuntansi pesantren yang di gagas oleh Bank Indonesia dan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) meskipun sifatnya tidak wajib namun harus diterapkan untuk seluruh pesantren, yaitu Pedoman Akuntansi Pesantren atau *Sistem Akuntansi Pesantren Indonesia (SANTRI)*.

Bank Indonesia (BI) dan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) merupakan organisasi Profesi Akuntan dan penyusun akuntansi keuangan di Indonesia yang telah bekerjasama keduanya menyusun suatu panduan pelaporan keuangan pondok pesantren yaitu Pedoman Akuntansi Pesantren yang telah mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimana dalam pedoman Akuntansi Pesantren ini sebagai pemberdayaan ekonomi pondok pesantren sehingga pondok pesantren dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku umum di Indonesia. Sesuai dalam penelitian (Romli:2018) dalam penelitiannya dia memaparkan PAP ini disusun berdasarkan acuan SAK ETAP yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik serta menggunakan PSAK no.45 tentang organisasi nirlaba serta ISAK syariah. Pertimbangan dalam memilih acuan kepada SAK ETAP dilandasi bahwa aset yang dikelola Pondok Pesantren relatif besar nilainya. Dimana sebagian besar aset Pondok Pesantren adalah Waqaf permanen berupa tanah. Format Penyajian atas laporan keuangan

Pondok pesantren yang diatur dalam Pedoman Akuntansi Pondok Pesantren mengacu pada PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.

Implementasi Laporan Pertanggungjawaban Pondok Pesantren pada Pesantren Miftahul Ulum Bettet Pamekasan dilakukan secara sederhana dan kurang terperinci seperti pemasukan berupa iuran santri, infaq, dan donasi dari donatur yang mana pencatatannya dicatat secara terpisah tanpa disertai dengan akun-akun dan dicatat hanya dengan pemasukan dan pengeluaran kas saja yang mana pelaporannya pun setiap bulan kepada pengasuh dan juga LPJ Pesantren ini berpengaruh bagi para donatur untuk dana yang terikat. Hal ini dilakukan karena dalam pesantren amat sangat percaya akan para pengurus yang memang ditanamkan dari ajaran yang diajarkan dari awal, begitu pula dengan kata mutiara pesantren yaitu amanah dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan cara yang telah ditetapkan Allah SWT. Maka dari itu sampai sekarang dalam pelaporan pertanggungjawaban dana Pondok Pesantren masih menerapkan konsep *Innamal A'malu Binniyat* yaitu suatu perilaku keyakinan kepada pengurus. Apakah konsep *Innamal A'malu Binniyat* atau sistem kepercayaan itu sudah dirasa cukup bagi pesantren tanpa mengikuti PAP sedangkan BI dan IAI ini memiliki niat baik untuk memperbaiki pesantren yang *good governance* yang mana tujuan dari PAP sendiri

Dalam penelitian (Rahmat,2019) yaitu suatu laporan keuangan dapat memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan untuk membuat keputusan ekonomi dan digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya (harta dan kewajiban) yang telah dipercayakan kepada entitas.

Dari latarbelakang di atas menggambarkan betul suatu kesimpangsiuran antara konsep yang diterapkan pesantren saat ini yaitu suatu konsep *Innamal A'malu Binniyat* atau kepercayaan yang mana sampai saat ini tidak pernah ada permasalahan yang signifikan dalam laporan pertanggungjawaban dana pesantren yang dijalankan. Namun bagaimana dengan niat baik BI dan IAI

untuk menata pesantren menjadi lebih dengan menerbitkan Pedoman Akuntansi Pesantren.

Maka dari itu peneliti mengangkat judul “Konsep *Innamal A'malu Binniyat* Pada Laporan Pertanggungjawaban Dana Pondok Pesantren (Study Kasus Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet Pamekasan)”.

Afkarina (2019) dengan judul penelitian “Rekonstruksi Penyusunan Laporan Keuangan di Pondok Pesantren Al-Anwari Banyuwangi (Dalam Perspektif Pedoman Akuntansi Pesantren) metode yang digunakan kualitatif dengan menggunakan data primer melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitiannya yaitu dalam proses penyusunan laporan keuangan Pondok Pesantren Al-Anwar belum menerapkan Pedoman Akuntansi Pesantren yang hanya melakukan pencatatan pengeluaran dan penerimaan kas yaitu merekap hasil pencatatan penerimaan kas yang berasal dari bendahara harian putra putri dengan model pencatatan yang mencatumkan saldo dari bulan sebelumnya, kemudian mencatat rincian penerimaan kas dan pengeluaran kas.

Firmansyah (2019) dalam judul penelitiannya “Analisis Penerapan Laporan Keuangan Berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren pada Pondok Pesantren AlQur'an Zaenuddin Tegal” dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan metode kombinasi (*mixed methods*). *Mixed methods* merupakan metode penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu (1) Dalam penyusunan laporan keuangan Pondok Pesantren Al-Qur'an Zaenuddin hanya melakukan pencatatan kas dengan *sistem single entry* (2) penyajian laporan keuangan Pondok Pesantren Al-Qur'an Zaenuddin belum sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pedoman Akuntansi Pesantren, kemudian peneliti memberikan rekomendasi penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren (3) Kendala yang dialami oleh Pondok Pesantren Al-Qur'an Zaenuddin dalam penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren adalah minimnya informasi dan sosialisasi tentang

pelaporan keuangan khususnya Pedoman Akuntansi Pesantren yang mereka dapat.

Penelitian yang dilakukan oleh Atufah, dkk (2018). Dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan PSAK No.45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Khairiyah” Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan teknik analisis kualitatif, hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwasanya menunjukkan laporan keuangan yang ada di Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren AlKhairiyah belum sesuai dengan penyusunan laporan keuangan berdasarkan format laporan keuangan nirlaba yang ada pada PSAK No. 45.

Romli (2018) meneliti tentang “peluang dan tantangan *Penerapan Sistem Akuntansi Pesantren Indonesia* (SANTRI) di Indonesia”, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif yang menggambarkan dan meringkas dari berbagai kondisi menggunakan data dokumenter dan wawancara. Dalam hasil penelitiannya menyatakan Pentingnya Akuntansi sebagai sistem pencatatan keuangan sekaligus sebagai alat pertanggung jawaban keuangan baik kepada manusia maupun Sang Pencipta, tidak terelakkan termasuk untuk lembaga sektor publik khususnya pondok pesantren. Oleh karena itu pondok pesantren adalah organisasi nirlaba yang memiliki ciri khas tersendiri, maka perlu dibuat standar akuntansi khusus untuk Pondok Pesantren yang bertujuan untuk mengimplementasikan pedoman tersebut ke dalam kondisi riil pondok pesantren.

Hal lain yang pernah dilakukan dalam penelitian sebelumnya banyak yang melakukan penelitian tentang pentingnya laporan pertanggung jawaban melihat dari realita yang ada di pesantren bahwa pesantren menerima suatu sumbangsih dari donatur. Rahmat (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Pondok Pesantren pada Pesantren Tahfidz Al Quran Al-Hasanah Bondowoso yang mana dalam penelitian ini menjelaskan bahwa suatu laporan keuangan dapat memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan untuk membuat keputusan

ekonomi dan digunakan sebagai laporan pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya (harta dan kewajiban) yang telah dipercayakan pada entitas dimana dalam penelitian Rahmat ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Dari penelitian-penelitian tersebut menggambarkan pentingnya laporan pertanggungjawaban pesantren baik hal tersebut bagi pesantren atau bagi para donatur. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, penelitian-penelitian terdahulu menggambarkan pentingnya suatu laporan keuangan bagi Pondok Pesantren yang sesuai dengan PSAK-45 atau ISAK 35 (Sekarang) dan pentingnya suatu PAP yang diterbitkan oleh IAI dan BI yang bertujuan untuk memperbaiki laporan keuangan sesuai dengan SAK yang berlaku secara umum sedangkan peneliti kali ini yaitu mengulas suatu laporan pertanggungjawaban dana pesantren yang dalam hal ini pesantren lebih condong menggunakan *Innamal A'malu Binnniyat* memasrahkan tanggungjawab dengan kepercayaan penuh atau keyakinan dan dengan laporan pertanggungjawaban yang kurang terperinci namun pengasuh tetap meyakini hal tersebut karena keyakinan itu yang memang ditanamkan dalam pesantren, perbedaan juga dilihat dari objek yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

## **TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Pedoman Akuntansi Pesantren**

Salah satu bentuk perhatian negara terhadap pesantren adalah dengan diterbitkannya buku Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP) yang dikenalkan dengan Sistem Akuntansi Pesantren Indonesia (SANTRI). PAP ini telah diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan Bank Indonesia (BI) bertepatan dengan kegiatan Indonesia Shari'a Economic Festival (ISEF) ke-4 di Surabaya tanggal 7-11 November 2017. PAP disusun berdasarkan acuan SAK-ETAP yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik serta menggunakan PSAK no 45 tentang organisasi nirlaba serta ISAK syariah. Pertimbangan dalam memilih acuan kepada SAK-ETAP dilandasi bahwa aset yang dikelola

Pondok Pesantren relative besar nilainya. Format penyajian atas laporan keuangan Pondok Pesantren yang diatur dalam Pedoman Akuntansi Pesantren mengacu pada PSAK 45 Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. (Romli:2018).

Pedoman Akuntansi Pesantren merupakan standar khusus yang digunakan untuk Pondok Pesantren, Pondok Pesantren yang merupakan organisasi nirlaba yang amat berbeda dengan organisasi bisnis yang mana menjalankan aktifitas operasionalnya memperoleh dari sumbangan para anggota dan dari para donatur. Para donatur tidak pernah meminta dan mengharapkan suatu imbalan atas bantuan yang diberikan, meski demikian para donatur yang juga sebagai *stakeholder* yang membutuhkan transparansi atas donasi yang telah mereka berikan, baik hal tersebut mempersyaratkan atau tidak tentu tetap menginginkan suatu laporan pertanggungjawaban atas donasi yang telah diberikan penjelasan tersebut yang berarti pondok pesantren harus membuat laporan pertanggungjawaban

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Agar para pembaca laporan keuangan memperoleh gambaran yang jelas, maka laporan keuangan yang disusun harus didasarkan pada prinsip akuntansi yang lazim. (Baridwan;2015;17). Maka dari itu dalam pencatatan laporan keuangan pesantren di anjurkan mengikuti Pedoman Akuntansi Pesantren.

Menurut Pedoman Akuntansi Pesantren yang ditetapkan oleh BI dan IAI tahun 2018, penyusunan laporan keuangan Yayasan Pondok Pesantren, terdiri atas beberapa unsur, yaitu :

1. Laporan posisi keuangan.
2. Laporan aktivitas.
3. Laporan arus kas; dan
4. Catatan atas laporan keuangan (CALK).

## **Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan keadaan yang dinilai karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas adalah kewajiban kewajiban dari individu-individu yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik serta yang berkaitan dengan itu, guna menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawaban fiskal, manajerial, dan program atau kegiatan. (Anggraini;2013) dalam (Murdayanti dan Dita;2019). Akuntabilitas di dalam penelitian ini berarti pertanggung jawaban terhadap pengelolaan dana Pondok Pesantren yang digunakan dalam pengelolaan kebutuhan pesantren.

*Accountability* sangat tertanam dalam masyarakat kaum muslimin sangat memegang teguh konsep manusia sebagai pemegang amanah, bukan sebagai pemegang kuasa penuh dalam hal mengatur alam semesta, manusia ditunjuk sebagai khalifah, yang harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang dilakukannya. Firman Allah dalam QS. Thaha ayat 6 disebutkan bahwa :

*“Kepunyaan Allahlah semua yang ada dilangit dan semua yang ada di bumi dan yang diantara keduanya dan semua yang ada ditanah”* Dalam ayat lain disebutkan, bahwa setiap perbuatan yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawabannya dihari penghisaban kelak, yaitu dalam QS. Al-Insyiqaaq, ayat 7-12 :

*“adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya (orang yang beriman) dengan gembira, adapun yang diberikan kitabnya dari belakang, maka ia akan berteriak, celakalah aku, dan ia akan masuk kedalam api yang menyala-nyala (neraka)”*.

Ayat tersebut menunjukkan konsep islam tentang amanah dan pertanggung jawaban atas amanah yang telah diberikan kepada manusia. Istilah hisab atau perhitungan, pengadilan atau *Accountability* merupakan saat permintaan pertanggungjawaban oleh Allah kepada manusia atas manifestasi dalam kehidupannya dihari pembalasan. (Santi: 2019).

Dari konsep-konsep akuntabilitas diatas, maka dapat diklasifikasikan beberapa indikator sebagai berikut:

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, penyajian, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*prinscipal*) yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Mardismo (2004) dalam Martha (2014).

Selanjutnya Menurut Zakarsyi (2008) dalam Huzila (2019) Pada prinsip akuntabilitas dalam Pondok Pesantren digunakan dua indikator, yaitu struktur pesantren dan sistem pesantren. Dengan diterapkannya proses akuntabilitas maka pesantren yang dikelola dapat berjalan secara benar, terukur dan tetap dapat mengakomodasi kepentingan seluruh *stakeholder* maupun kepentingan Pondok Pesantren sendiri. Menurut Oktafia dan Abdul (2017) Indikator akuntabilitas dari penilaian ranking sebagai berikut.

- a. Adanya struktur pesantren yang jelas
- b. Adanya sistem akuntansi yang jelas

Akuntabilitas pada laporan pertanggungjawaban dana Pondok Pesantren dapat diukur struktur pesantren apakah struktur pesantren sudah jelas dan tidak ada kepemimpinan ganda. Pun juga dari segi sitem pesantren meliputi sitem operasional yang baik.

### **Transparansi (*Transparency*)**

Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di Pondok Pesantren, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan Pondok Pesantren, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. (Arifin;2016) Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua santri melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Coryanata (2007) dalam Auditya at,al (2013) mengatakan transparansi dibangun di atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut: 1) terdapat pengumuman kebijakan anggaran. 2) tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses. 3) tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu. 4) terakomodasinya suara dan 5) terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Dalam ruang lingkup manajemen keuangan Pondok Pesantren transparansi berarti keterbukaan akan kebijakan keuangan, keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, keterbukaan penggunaannya serta pertanggungjawabannya sehingga akan mempermudah *stakeholder* untuk mengetahuinya. Menurut Krina (2003: 17) dalam Reza (2018) indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan informasi yang jelas.
- b. Kemudahan akses informasi.
- c. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.
- d. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Sedangkan menurut Oktafia dan Abdul (2017) menjabarkan indikator transparansi sebagai berikut:

- a. Adanya informasi yang jelas.
- b. Adanya kebijakan yang diterapkan oleh organisasi

Dengan adanya indikator-indikator transparansi diatas dapat kita lihat bahwa transparansi merupakan alat yang sangat penting untuk menjembatani kebutuhan. Transparansi dalam laporan pertanggungjawaban dana pesantren ini di ukur dari segi informasi dan kebijakan yaitu informasi informasi yang terbuka baik untuk pihak interal dan eksternal sedangkan dalam kebijakan pesantren yaitu kebijakan ditentukan berdasarkan bersama dan dilakukan evaluasi secara rutin.

Akuntabilitas dan transparansi dana Pondok Pesantren akan memberikan informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktifitas dan kinerja keuangan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet Pamekasan kepada semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) sehingga hak untuk tau, hak untuk didengar aspirasi dan hak diberi informasi

## **METODE PENELITIAN**

Jenis dari penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, pendekatan yang digunakan deskriptif, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan memaparkan keadaan yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan keadaan sosial yang sesuai dengan fakta yang bertujuan untuk menghasilkan temuan-temuan dengan cara mendeskripsikan, menggambarkan sesuatu sesuai dengan fakta yang ada. Sugiono (2016). Lokasi penelitian ini adalah Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet Pamekasan didasarkan atas pertimbangan kesesuaian topik penelitian, yang mana Pondok Pesantren dalam laporan pertanggungjawaban masih menggunakan sistem kepercayaan dan laporan yang kurang terperinci tidak mengikuti aturan pemerintah yaitu Pedoman Akuntansi Pesantren yang hanya pencatatan kas keluar dan kas masuk dan alasan berikutnya yaitu fokus penelitian di anggap layak untuk dilakukan penelitian oleh peneliti sebagai tempat dilaksanakannya penelitian tersebut.

Menurut Arifin (2014) dalam (Afkarina :2019) pada penelitian kualitatif data yang dikumpulkan dilakukan dalam *natural setting* (kondisi yang amaliyah), sumber data primer, dan lebih banyak menggunakan teknik observasi, wawancara serta dokumentasi. Berdasarkan teori tersebut peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Observasi**

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini sebagaiberikut:

- a. Mengamati kondisi internal Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet Pamekasan.
- b. Mengamati masalah mengenai keuangan dan laporan pertanggungjawaban Pondok pesantren Miftahul Ulum Bettet Pamekasan.

### **2. Wawancara / Interview**

Dalam wawancara peneliti ini peneliti terjun kelapangan langsung, dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada karyawan dengan tujuan untuk memperoleh data secara lebih terbuka dimana pihak responden diminta untuk memberikan pendapat/ide-ide tentang permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh untuk mengetahui Konsep *Innamal A'malu Binniyat* Pada Laporan Pertanggungjawaban Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet Pamekasan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai suatu aspek pertimbangan dalam melakukan pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga peneliti dapat memperoleh data yang lengkap dan bukan berdasarkan perkiraan belaka. Maka dalam penelitian ini peneliti yaitu mempelajari dokumen-dokumen berupa laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan yang dimiliki Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet Pamekasan.

Menurut Bogdan & Biklen analisis data sebagaimana dikutip oleh Lexy J Moleong dalam bukunya metodologi penelitian kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milahnya dengan satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Moleong:2011:248).

Data yang akan di analisis melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun tahap-tahapanalisis data adalah sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak. Oleh karena itu, reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk agar tidak mempersulit selanjutnya.

#### 2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar variabel, agar peneliti lain atau pembaca laporan penelitian mengerti apa yang telah terjadi dan apa yang perlu di tindak lanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. (Satoria dan aan:2009:219). Data yang disajikan dala penelitian ini yaitu merupakan data primer dan data sekunder yang di peroleh dari pondok pesantren melalui informen-informen.

### 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Langkah ketiga dalam data kualitatif menurut Miles and Huberman dalam bukunya Sugiono adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. (Sugiono:2011:252). Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan analisis data, akan tetapi mungkin masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada dilapangan dalam penelitian mengenai konsep *innamal a'malu binniyat* pada laporan pertanggungjawaban Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet Pamekasan..

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Data yang berhasil di kumpulkan terkait Laporan Pertanggungjawaban Dana Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet Pamekasan yang diperoleh dengan metode pengumpulan data triangulasi, dan disajikan sebagaimana keterangan dari berbagai informan yang memang menjadi target peneliti dalam pengumpulan data dan informasi.

Laporan pertanggungjawaban dana pesantren dikelola oleh bendahara umum dan dilaporkan kepada wakil pimpinan setelah pertanggungjawaban di terima dari wakil pimpinan maka dipertanggungjawabkan kepada pengasuh yang dilakukan laporan setiap awal bulan, *konsep innamal a'malu binniyat* merupakan konsep yang di terapkan oleh pesantren sampai saat ini, mengemban amanah

dengan baik, menjaga kepercayaan dan mempertanggungjawabkan amanah yang diemban.

Dana dalam Pondok Pesantren hanya diperoleh dari iuran santri begitu juga dana dikeluarkan untuk keperluan pesantren baik dari segi perbaikan dan pelaksanaan kegiatan pesantren. Pernyataan tersebut di sampaikan oleh informan yang diwawancarai oleh peneliti meliputi: panitia pelaksana kegiatan, bendahara umum pesantren, dan wakil pimpinan, ketiga informan tersebutlah yang memang banyak berperan dalam pengelolaan laporan pertanggungjawaban dana Pondok Pesantren.

Kas masuk merupakan tanda bukti transaksi bahwa pesantren telah menerima uang secara cash. Sumber dana pondok pesantren yang memang digunakan dalam setiap pelaksanaan kegiatan pesantren dan kebutuhan pesantren disini diperoleh dari santri dan digunakan untuk santri seperti halnya yang di paparkan oleh bendahara umum pesantren dalam pelaksanaan wawancara peneliti sebagai berikut:

*“Sumber dana pesantren diperoleh dari SPP santri yang memang di keluarkan untuk kebutuhan pesantren seperti biaya listrik dalam setiap bulan, perbaikan desel, sibel, pet, dan sebagainya, namun terkecuali tidak dikeluarkan untuk pembangunan karena untuk biaya pembangunan disini ada dana pembangunan, tor jugeh manabi akadiah kegiatan OMIS sareng BESAN ada penarikan lain, namun bendahara umum membantu jika deri organisasi tersebut mengajukan permohonan dana”. (Amir,2020)*

Jadi, prosedur kas masuk yang di lakukan oleh bendahara pesantren yaitu dengan menggunakan buku SPP yang di pasrahkan kepada bendahara kelas, begitu juga bagi panitia kegitan, ketika penarikan sumbangan dalam pelaksanaan kegiatan bendahara dalam panitian kegiatan memberikan surat penarikan sumbangan dalam pelaksanaan kegiatan, baik panitia kegiatan dalam organisasi pesantren maupun panitia kegiatan akhirus sanah, sebagaimana yang dinyatakan oleh panitia kegiatan:

*“Dalam penarikan iuran kegiatan, panitia ka’dintoh abedih surat permohonan sumbangan e parengagih setiap kelas e atoragih ke ustadz wali kelaseh masing-masing, enggi penarikennah ka; dintoh Rp10.000 sataon yang ditagih di awal*

*bulan, manabi kegiatan akhirus sanah Rp 50.000 delem sataon e tagi sabben akhir tahun ”. (Faruq,2020)*

Jumlah saldo kas pesantren yang di dapat dari SPP santri akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dalam kehidupan pasti akan mengalami suatu pengeluaran meliputi biaya dan semacamnya. Pengalokasian dana dilakukan untuk kegiatan dan kebutuhan pesantren, bagaimana pemaparan dari bendahara:

*“Dana pesantren disini digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan pesantren, seperti biaya listrik, perbaikan sibel, pet dan sebagainya, untuk bukti pembayaran, ghi manabi bedeh nota epentah, manabi sobung tidak ada masalah karna uang diberikan sesuai kebutuhan”. ( Amir,2020 )*

Prosedur dari pengeluaran dana yang di keluarkan bendahara untuk kegiatan pesantren, dalam hal ini bendahara memberikan dana kepada departemen yang membutuhkan dana tersebut sesuai kebutuhan tanpa surat dan semacamnya. Penerimaan kas dan pengeluaran kas dibutuhkannya laporan pertanggungjawaban sebagai bukti dan pertanggungjawaban pengelolaan dana yang menjadi tanggungjawab bendahara, pertanggung jawaban dana pesantren dilakukan dalam setiap satu bulan sekali dan dilakukan dalam setiap awal bulan sebagaimana yang disampaikan bendahara pesantren ustadz Amir:

*“Dalam setiap pengeluaran, enggi dicatat dan dilaporkan dalam setiap satu bulan satu kali, enggi saben awal bulen,enggi dalam laporannya sebelum ke pengasuh, dipertanggungjawabkan dimin ke wakil pimpinan, baru ketika di setuju dari WAPIM maka dipertanggungjawabkan ke pengasuh melalui kabuleh tanpa keterangan, hanya saja jika pengasuh mareksanah, ghi bendahara harus siap mempertanggung jawabkan laporan tersebut”. (Amir,2020)*

Pesantren yang memang ditanamkan suatu kepercayaan sesuai dalam hadits yang memang diajarkan di pesantren yaitu *Innamal A'malu Binniyat* dan dari konsep yang memang sampai saat ini diterapkan dalam pesantren tidak pernah terjadi masalah yang urgen, maka dari itu pesantren tetap menerapkan konsep tersebut. Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang terdapat struktur secara jelas pesantren dengan program kerja yang memang harus dijalankan selama pengabdian dalam pesantren yang mana hal tersebut dilakukan hanya untuk mengabdikan dan mencari

barokah seperti dalam pemaparan dari wakil pimpinan pesantren yang diwakili oleh ustadz jamalidin:

*“Enggi, struktur dilembaga pesantren ini sudah terstruktur secara jelas, dilakukan evaluasi program dengan waktu yang tidak tentu, terkadang setiap pertengahan tahun dan terkadang setiap semester dilakukan rapat evaluasi”* (Jamal,2020).

Dalam penetapan kebijakan organisasi, termasuk kebijakan dana dalam Pondok Pesantren Bettet jika dirasa dana cukup besar maka kebijakan di tetapkan oleh WAPIM, sesuai dengan penyampaian WAPIM:

*“Nah ketika dibutuhkan kebijakan dalam pengeluaran maka langsung meminta kebijakan dari WAPIM jika waktu tidak memungkinkan untuk dilaksanakan rapat secara menyeluruh maka cukup kebijakan dari WAPIM, dan ketika skalanya besar maka dari WAPIM akan melaporkan kepada pengasuh”*. (Jamal,2020)

Transparansi dari laporan pertanggungjawaban dan dianggap resmi dan benar ketika telah di sahkan atau ditandatangani oleh ketiga pihak, yaitu meliputi: bendahara, wakil pimpinan, dan pengasuh, sebagaimana pemaparan bendahara:

*“Yang mengoreksi dalam laporan pertanggungjawaban dan ditandatangani oleh bendahara, wakil pimpinan dan pengasuh”*. (Amir,2020)

### **Pembahasan**

Pertanggungjawaban dana Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet Pamekasan dibuat dengan sederhana yaitu hanya dengan kas masuk, kas keluar dan saldo saja, begitu juga tidak dilampirkan suatu bukti pembayaran berupa nota pembelian hal tersebut tidak dipermasalahkan karena pesantren lebih mengutamakan kepercayaan (amanah), padahal dalam penelitian Mellani (2016) menyatakan laporan yang berkualitas salah satunya secara dibuat secara lengkap seperti tanggal dan bukti pembayaran.

### **Sistem Informasi Akuntansi**

Laporan penerimaan kas berisi rincian uang tunai dan cek yang diterima selama satu hari. Laporan dimaksudkan untuk melakukan pengawasan terhadap kas, yaitu untuk mencegah terjadinya kecurangan, dan menjamin bahwa tidak ada penerimaan yang hilang sebelum dikreditkan kepada rekening pelanggan. Di

negara yang lebih maju, penerimaan pelunasan ini melalui surat. Perusahaan menugaskan petugas penerima surat (*Mail Room*) untuk membuka kiriman ini dan sekaligus membuat daftar penerimaan kas sebanyak-2 lembar, lembar ke-1 sekaligus *check*-nya diserahkan kekasir, dan lembar ke-2 diserahkan kebagian akuntansi bersama dengan bukti kas masuknya (Krismiaji: 2010;304).

Berdasarkan pengumpulan data yang berhasil penulis kumpulkan melalui metode wawancara dengan bendahara pesantren (Ustadz Amir) dapat diketahui bahwa Pondok Pesantren dalam penerimaan dana kas masuk yang di peroleh dari iuran santri dan dikeluarkan untuk kebutuhan pesantren seperti biaya perbaikan dan sebagainya belum maksimal dan optimal dalam pelaksanaannya dikarenakan dalam aliran informasi yang dilakukan pesantren dalam penarikan kas masuk bendahara memmberikan buku kas masuk kepada setiap kelas yang menjadi tanggungjawab bendahara kelas mengumpulkan dana tersebut dan bendahara dalam setiap bulannya menarik iuran tersebut kepada bendahara kelas tanpa ada kuitansi dan lainnya hanya saja bukti pembayarannya di landasi dengan buku kas bendahara kelas tersebut. namun tidak dengan Dana Pembangunan dimana dana pembangunan dipisah dan tidak menjadi tanggungjawab bendahara umum karena penanggungjawab dalam dana pembangunan dialihkan kepada kabuleh/supir pribadi pengasuh dikarenakan yang menghendel pembangunan ini kabuleh maka pesantren mengambil alihkan dana pembangunan ini kepada kabuleh, begitu juga hal tersebut lebih meringankan beban bendahara umum pesantren bendahara umum pesantren dapat lebih fokus pada pengelolaan dana pesantren yang digunakan untuk biaya-biaya pesantren.

Berdasarkan kondisi dan hasil pengumpulan data terkait Kondisi SIA pada pondok pesantren kurang optimal dan maksimal dalam pelaksanaanya tidak sesuai dengan teori yang ada, dimana dalam prosedur penerimaan kas bendahara hanya memberikan buku kas masuk kepada bendahara tanpa adanya bukti pembayaran berupa kuitansi (*cekc*) sehingga tidak diketahui aliran keluar kas masuknya. Maka dari Pesantren perlu menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) penyusunan arus kas masuk, dalam penyusunan SOP pesantren perlu adanya membentuk prosedur kas masuk dengan bukti penerimaan dan pembayaran bagi para santri hal ini dapat serupa bukti transaksi (kuitansi

penerimaan kas) rangkp-2, menerima uang dari santri, mengisi kartu pembayaran, memberikan paraf dan cap lunas kemudian mencatat transaksi tersebut pada buku daftar pembayaran administrasi bulanan dan dari lembaran kuitansi tersebut lembar pertama menjadi tanggungjawab bendahara dan di berikan kepada pihak administrasi untuk di catat dan diposting, sedangkan lembara ke-2 dapat menjadi tanggung jawab santri sebagai bukti pemabayaran yang ditandatngani secara sah oleh bendahara. dari hal tersebut maka bukti pembayaran dapat dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban dana pondok pesantren begitu juga dapat mencegah adanya kecurangan bagi panitia sendiri dan bagi orang tua santri ini akan mengetahui bukti pembayaran tanpa ada keraguan.

Soemarso (1992:325) dalam (Tuerah 2013) menyatakan untuk dapat menghasilkan sistem pengawasan yang baik, prosedur pengeluaran harus memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Semua pengeluaran dilakukan dengan *cekc*, pengeluaran-pengeluaran dalam jumlah kecil dilakukan melalui dana kas kecil.
2. Semua pengeluaran kas harus memperoleh persetujuan dari yang berwenang terlebih dahulu.
3. Terdapat pemisahan tugas antara yang berhak menyetujui pengeluaran kas, yang menyimpan uang kas dan melakukan pengeluaran serta yang mencatat pengeluaran kas.

Informasi yang diperoleh dalam wawancara kepada bendahara umum beliau menyatakan bahwa dalam sistem pengeluaran kas yang di gunakan untuk kebutuhan pesantren dari setiap departemen yang membutuhkan dana maka departemen tersebut langsung meminta dana kepada bendahara dan menyatakan kebutuhannya tanpa harus mengajukan permohonan dana terlebih dahulu terkecuali organisasi membutuhkan dana maka dengan surat permohonan dana. Beliau juga menyatakan bahwa jika dana yang dibutuhkan departemen cukup besar yaitu lebih dari Rp 5.000.000,- maka bendahara umum terlebih dahulu melaporkan kebutuhan tersebut kepada wakil pimpinan, jika wakil pimpinan sudah menyetujui maka dari bendahara umum tersebut mengeluarkan dana secara *chas* tanpa kuitansi atau bukti pengeluaran lain hanya saja bendahara mencatat

pengeluaran tersebut untuk di pertanggungjawabkan kepada WAPIM dan pengasuh.

Begitu juga panitia kegiatan menyatakan bahwa dalam penggunaan dana kegiatan ini secara *chas* tanpa kuitansi dan dalam penggunaan ini juga tidak dituntut harus ada bukti transaksi berupa nota hanya melaporkan mengenai pengeluaran yang digunakan dikarenakan dalam Pondok Pesantren Pesantren Miftahul Ulum Bettet menerapkan sistem kepercayaan (amanah). Prosedur yang baik yaitu semua transaksi pengeluaran yang digunakan harus dengan bukti transaksi dan pembagian tugas dalam struktural, yakni dengan ditambahkan satu fungsi berupa bagian administrasi yang mencatat pengeluaran kas. Kemudian dari pengeluaran tersebut melaporkan bersama bendahara kepada wakil pimpinan untuk di otorisasi oleh WAPIM, dikarenakan dalam undang-undang bendahara dalam pesantren bendahara hanya bertugas mengeluarkan tidak dengan memutuskan atau meng otorisasi pengeluaran.

### *Laporan Peranggungjawaban Pesantren*

Mellani (2016) dalam penelitian skripsinya yang berjudul Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Rangka Penyajian Laporan Pertanggung Jawaban Pada SMA Aisyiyah 1 Palembang, hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa suatu laporan yang berkualitas mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Akurat artinya informasi mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Pengujian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berbeda dan apabila hasil pengujian tersebut menghasilkan yang sama maka dianggap data tersebut akurat.
2. Tepat waktu artinya informasi itu harus tersedia atau ada pada saat informasi tersebut diperlukan, tidak besok atau tidak beberapa jam lagi.
3. Relevan artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan kalau kebutuhan informasi ini untuk suatu organisasi maka informasi tersebut harus sesuai dengan kebutuhan informasi diberbagai tingkatan dan bagian yang ada dalam organisasi tersebut.

4. Lengkap artinya informasi harus diberikan secara lengkap. Misalnya informasi tentang penjualan tidak ada bulannya atau tidak ada data pembeliannya. Adapun karakteristik laporan yang baik mempunyai ciri-ciri antara lain :
- a. Ketersediaan sudah barang atau syarat yang mendasar bagi suatu informasi adalah tersedianya informasi itu sendiri. Informasi harus dapat diperoleh bagi orang yang hendak memanfaatkannya.
  - b. Mudah dipahami Informasi harus mudah dipahami oleh pembuat keputusan, baik itu informasi yang menyangkut pekerjaan rutin maupun keputusan-keputusan yang bersifat strategi. Informasi yang rumit dan berbelit-belit akan membuat kurang efektifnya keputusan manajemen.
  - c. Relevan dalam konteks organisasi, informasi yang diperlukan adalah benar-benar relevan dengan permasalahan, misi dan tujuan organisasi.
  - d. Bermanfaat sebagai konsekuensi dari syarat relevansi, informasi juga harus bermanfaat bagi organisasi. Karena itu informasi juga harus dapat tersaji kedalam bentuk-bentuk yang memungkinkan pemanfaatan oleh organisasi yang bersangkutan.
  - e. Tepat waktu Informasi harus tersedia tepat waktunya. Syaratnya ini terutama sangat penting dan bersama pada saat organisasi membutuhkan informasi ketika manajer hendak membuat keputusan-keputusan yang krusial.
  - f. Keandalan Informasi harus diperoleh dari sumber-sumber yang dapat diandalkan kebenarannya. Pengelolah data atau pemberi informasi atau harus dapat menjamin tingkat kepercayaan yang tinggi atas informasi yang disajikan.
  - g. Akurat Syarat ini mengharuskan bahwa informasi bersih dari kesalahan dan kekeliruan. ini juga berarti bahwa informasi juga harus jelas dan pendukungnya.

- h. Konsisten Informasi tidak boleh mengandung kontradiksi didalam penyajian karena konsisten merupakan syarat penting bagi dasar pengambilan keputusan.

Berdasarkan dari hasil pengumpulan data yang dikumpulkan oleh penulis melalui metode wawancara dengan bendahara umum, panitia kegiatan, dan wakil pimpinan menghasilkan informasi bahwa dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dana Pondok Pesantren disini hanya terdapat no, keterangan, debit, kredit tanpa adanya bukti transaksi, bukan menjadi kendala bagi pesantren untuk menyertakan bukti transaksi, namun karna konsep kepercayaan (amanah) yang diterapkan dalam pesantren. Laporan yang disajikan di tandangani oleh pengasuh, wakil pimpinan, dan bendahara umum, dalam setiap bulan tepatnya pada setiap awal bulan laporan dibuat.

Panitia pelaksana juga menyatakan bahwa dalam pesantren menggunakan sistem kepercayaan (amanah) yang mana mencari barokah dan mengharap ridho Allah hal tersebut yang memang sampai saat ini masih sampai saat ini diterapkan dala pesantren.

Sesuai dengan analisis data yang diperoleh dari bendahara umum, wakil pimpinan, dan panitia kegiatan, dapat dikatakan sudah cukup baik, dalam pelaporan yang di buat sudah tepat waktu, mudah di pahami hanya saja laporan yang di sajikan kurang berkualitas dan kurang hal tersebut di buktikan dari laporan yang dibuat kurang lengkap tanpa adanya bukti transaksi yang tidak akurat. Pondok pesantren perlu menetapkan prosedur dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban dana dilampiri bukti transaksi agar laporan yang dibuat akurat dan dapat dipercaya keabsahannya, memang benar kepercayaan itu perlu namun, hal yang tidak diinginkan bisa jadi terjadi maka perlu adanya kehati-hatian dalam membuat laporan pertanggungjawaban dengan melampirkan bukti transaksi.

### **Kebijakan Organisasi**

Manajemen membutuhkan suatu struktur organisasi agar dapat dijalankan dengan bai Dengan menggunakan bagan organisasi (*organization charts*) dan uraian jabatan (*job descriptions*) bagan organisasi dapat mengidentifikasi segmen-

segmen yang ada dan mengkomunikasikan hubungan atasan dengan bawahan. Sebuah struktur organisasi memberikan lingkungan bagi aliran informasi. (Krismiaji:2010;46)

Berdasarkan pengumpulan data yang penulis kumpulkan melalui wawancara dengan bendahara umum Pondok Pesantren menghasilkan informasi yang berbeda. Wakil pimpin menjelaskan penguasaan operasional dalam organisasi hanya pada pemisahan tugas kepada para asatidz, pihak yayasan juga hanya memasrahkan penuh tanggungjawab kepada para asatidz, dalam pembentukan struktural beserta tugas-tugasnya memasrahkan penuh kepada wakil pipinan begitujuga dalam menetapkan kebijakan, yang menetapkan itu semua wakil pimpinan, namun WAPIM dalam pelaksanaan tugas dari setiap departemen dari struktural tersebut sudah berjalan dengan lancar hanya saja dalam penetapannya ini tidak melihat dari keahlian masing-masing asatidz namun karna kepercayaan (amanah) dan anggapan bahwa para asatidz yang ditetapkan mampu mengemban amanah dengan baik.

Begitu juga pernyataan bendahara umum bahwa semua konsep yang diterapkan dalam pesantren ini dengan konsep kepercayaan (amanah) mencari barokah dan mengharap rido allah baikitu juga dalam penetapan struktural maupun dalam menjalankan tugas, namun semuanya tetep transparansi dari setiap keadaan dan mempertanggungjawabkan kepada pengasuh seperti halnya dalam laporan pertanggungjawaban dana Pondok Pesantren yang memang menyerahkan laporan pertanggung jawaban kepada WAPIM dan pengasuh dalam setiap awal bulan. Dan sampai saat ini tata kelola struktural tetap berjalan dengan baik. Hanya saja dalam pengalihan tanggungjawab dalam dana pesantren yang dialihkan kepada kabuleh/supir yang memang tidak tertera dalam struktur organisasi.

Sesuai dengan analisis data yang diperoleh dari wakil pimpinan dan bendahara umum. Bahwa dalam penetapan strukur dan tugas organisasi yang dijalankan Pondok Pesantren sudah cukup baik dan tertata dengan baik. Hanya saja secara fungsi tidak berjalan secara optimal sebagai berikut:

## **SIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai Konsep *Innamal A'malu Binniyat* Pada Laporan Pertanggung Dana Pondok Pesantren Di Miftahul Ulum Bettet Pamekasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis data pondok pesantren struktur pengendalian operasional masih kurang optimal. struktur pengendalian keuangan pesantren masih bersifat pemasrahan penuh kepada bendahara umum pesantren. Disisi lain khusus keuangan bidang pembangunan dipasrahkan kepada kabuleh. Prosedur yang digunakan adalah prosedur struktural tidak akurat. Dan juga pada data yang terkait Kondisi SIA pada pondok pesantren kurang optimal dan maksimal dalam pelaksanaanya tidak sesuai dengan teori yang ada.
2. Bendahara dan panitia pelaksanaan dapat disimpulkan bahwa prosedur yang berjalan masih kurang optimal, disebabkan belum adanya penyusuna SOP dalam pengeluaran dana.
3. Khusus sektor Laporan pertanggung jawaban, pesantren menyajikan laporan pertanggungjawaban pada setiap awal bulan. Laporan pertanggung jawaban kurang optimal, disebabkan penyajiannya hanya sekedar data, tanpa di dukung bukti transaksi.
4. Tugas organisasi yang dijalankan Pondok Pesantren sudah cukup baik. Hanya saja secara fungsi tidak berjalan secara optimal, disebabkan pembagian dan penetapan tugas belum berjalan secara optimal.

## 5.2 Rekomendasi/saran

1. Pondok Pesantren seharusnya penyusun struktur pengendalian khusus bidang keuangan. Pesantren bukan hanya menggunakan metode pemasrahan tanggungjawab saja, namun mengikuti prosedur yang sudah di terapkan. Sehingga ada pemisahan tanggungjawab antara bendahara dan supir. Jika supir harus masuk dalam struktur pengendalian maka supir perlu dimasukkan sebagai orang yang perlu bertanggung jawab dalam penggunaan dana pembangunan. Sisi yang lain perihal dengan SOP penerimaan seharusnya Pondok Pesantren menyusun SOP penerimaan, baik itu yang diterima melalui dari pembayaran santri atau melalui buku kas masuk.

2. Pondok Pesantren seharusnya menyusun SOP pengeluaran kas. Semua transaksi pengeluaran yang digunakan harus dengan bukti transaksi. Sisi lain pembagian tugas dalam struktural, yakni dengan ditambahkan satu fungsi berupa bagian administrasi yang mencatat pengeluaran kas. Kemudian dari pengeluarn tersebut melaporkan bersama bendahara kepada wakil pimpinan untuk di otorisasi oleh WAPIM, dikarenakan dalam undang-undang bendahara dalam pesantren bendahara hanya bertugas mengeluarkan tidak dengan memutuskan atau meng otorisasi pengeluaran.
3. Pondok Pesantren seharusnya dalam penyusunan LPJ terdapat lampiran bukti kas masuk, kas keluar agar tedapat bukti yang sah dan dapat dipercayai dan akurat.
4. Pondok Pesantren perlu adanya perbaikan tugas dan fungsi dari setiap departemen sebagai berikut:
  - a. Pondok Pesantren dalam Pengeluaran dana bendahara seharusnya mengotorisasi kepada pihak yang berwenang tidak langsung memberi kebijakan sendiri.
  - b. Pondok Pesantren perlu membentuk pemisahan tugas antara adimistrasi, yang mana tugasnya mencatat dan mengarsikan berkas-berkas bendahara sedangkan bendahara hanya pada penyimpanan dana pesantren. Begitu juga dalam penetapan tanggungjawab dana pembangunan seharusnya menjadi tanggungjawab bendahara bukan supir, maka dapat membentuk bagian bendahara.

### **Kutipan dan Referensi**

Al Qur'an - Al karim

Atufah Intan Devi, dkk. 2018. Penerapan PSAK No.45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Khairiyah. *International Journal of Social Science and Business*, Vol. 2, No. 3:115-123.

Agung Muhammad Ivan dan Desma Husni, 2016. Pengukuran Konsep Amanah dalam Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal Psikologi*, Vol. 43, No. 3: 194-206.

- Afkarina Irsa Azizah, 2019. Rekontruksi Penyusunan Laporan Keuangan Dipondok Pesantren Al-Anwari Banyuwangi (Dalam Persepektif Pedoman Akuntansi). Skripsi: Jurusan Akuntansi Universitas Jember.
- Asmah Arina Yuni, 2019. Pengaruh Kepercayaan Dan Kepemimpinan Transformasional Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pondok Pesantren Kholaf (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Kholaf Di Kabupaten Demak). Skripsi: Jurusan Akuntansi Syariah UIN Malisongo Semarang.
- Auditya Lucy, dkk. 2013. Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness*, Vol. 3, No. 1: 21-41.
- Arifin Miftahol, 2016. Manajemen Keuangan Pondok Pesantren.
- Baridwan Zaki, 2015. *Intermediate Accounting*. Yogyakarta: BPFE.
- Djam'an Satori dan Aan komariah. 2009. *Metodelogi Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- M.Budifa Ilham, 2018. Manajemen Keuangan Pesantren Ummul Ayman Samalanga Kabupaten Bireuen. Skripsi: Jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Firmansayah Ifan Ade, 2019. Analisis Penerapan Laporan Keuangan berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren pada Pondok Pesantren Al-Qur'an Zaenuddin Tegal. Skripsi: Jurusan Akuntansi Universitas Panca Sakti Tegal.
- Huzila Zia, 2019. Adopsi Good Governance Dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pondok Pesantren Annuqayah Lubangsa. Artikel: Jurusan Akuntansi Universitas Wiraraja Sumenep.
- Jusup Al. Haryono, 2011. *Dasar-dasar Akuntansi Jilid 1*. Yogyakarta: AdMark.
- Kamayanti Ari, 2018. Akuntansi Pesantren: Immaculate Conception of IAI and BI.
- Krismiaji, 2010. *Sistem Informasi Akuntansi Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Jl. Palangan Tentara Pelajar.

- Liviani, dkk. 2016. Uji Model Keseimbangan Teori Keagenan: Pengaruh Kebijakan Utang Dan Kebijakan Dividen Terhadap Kepemilikan Manajerial. *Jurnal Manajemen*, Vol. 11, No. 1: 102-120.
- Martha Widya, 2014. Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Di Kota Bandung (Survey Diinstansi Pemerintah Kota Bandung). Skripsi: Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama.
- Mellani, 2016. Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Rangka Penyajian Laporan Pertanggung Jawaban Pada Sma Aisyiyah 1 Palembang. Skripsi: Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Murdayanti Yunika dan Dita Puruwita, 2019. Kompetensi Sdm Keuangan Dan Akuntabilitas Pesantren. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, Vol. 7, No. 1: 19-29.
- Moleong Lexy J. 2011. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Oktafia Renny dan Abdul Basith, 2017. Implementasi Good Corporate Governance Pada Pondok Pesantren Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1: 71-86.
- Qs. Al- Insyiqaaq, Ayat 7-12.
- Qs. Thaha, Ayat 6.
- Qs. As-Saff Ayat 10-13.
- Rahmat Puspaning Rahmani, 2019. Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Pondok Pesantren Pada Pesantren Tahfidz Al Quran Al-Hasanah Bondowoso. Skripsi: Jurusan Akuntansi Universitas Jember.
- Romli Muhammad, 2018. Peluang Dan Tantangan Penerapan Sistem Akuntansi Pesantren Indonesia (Santri) Di Indonesia. *Jurnal Ekomadania*, Vol. 2. No.1: 35-51.
- Reza Eki Muhammad, 2018. Transparansi Penggunaan Dana Desa Di Kepenghuluansekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Skripsi: Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Santi Nova, 2019. Analisis Pelaporan Keuangan Yayasan Pondok Pesantren Berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren (Studi Pada Az Zahra Islamic Boarding School, Way Huwi, Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan). Skripsi: Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tuerah Serny. 2013. Evaluasi Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Pembelian dan Pengeluaran Kas pada UD. Roda Mas Manado. *Jurnal EMBA*, Vol. 1. No. 3 : 225-232.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2001 (16/2001) tentang Yayasan.